

PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN DI BIDANG PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN PADA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (KESBANGPOL & LINMAS) KOTA SORONG

Sitti Sainab¹, Muh. Ridha Suaib Suaib², Arie Purnomo³

¹²³Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong Universitas

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan wawasan kebangsaan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan wawasan kebangsaan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan pada kantor KESBANGPOL Kota Sorong. Tempat atau lokasi dilakukannya penelitian ini ialah pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol & Linmas) Kota Sorong. Waktu penelitian direncanakan akan dilakukan mulai dari bulan Oktober 2016 – Januari 2017. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Sorong adapun sampel penelitian yaitu Kepala Bidang Kesbangpol, Kepala Bidang, dan staf pegawai. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan wawasan kebangsaan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan dilakukan melalui sosialisasi dan diskusi adapun faktor pendukung yakni anggaran, sarana dan prasarana, sinkronisasi organisasi dan faktor penghambat antara lain minimnya anggaran, tidak adanya sarana dan prasarana, dan ketidak samaan struktur organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perlu adanya sosialisasi yang rutin penyediaan anggaran dan penyinkronan struktur organisasi pada kantor tersebut.

Kata kunci: Wawasan, Nilai Kebangsaan, Kebangpol,

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara. Hal lain yang perlu disadari bahwa perjalanan hidup bangsa Indonesia yang telah merdeka sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang menunjukkan dinamika yang cukup tinggi. Selama kurun waktu lebih dari 69 tahun penyelenggaraan pemerintahan negara ternyata masih diwarnai banyak kemelut politik, yang sangat mengganggu stabilitas nasional.

Kesadaran kebangsaan yang kemudian melahirkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, pada dasarnya tumbuh dan berkembang oleh dorongan kehendak bersama, seluruh komponen masyarakat budaya, yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara demi membangun satu masyarakat baru yang utuh sebagai satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia berdasarkan dasar dan ideologi negara Pancasila. Bangsa juga merupakan masyarakat dengan kesatuan spirit/karakter (Karakter *Gemeinschaft*). Oleh karenanya, perlu disadari pula bahwa bangsa Indonesia yang merupakan sebuah himpunan dari berbagai ragam masyarakat budaya, adat, bahasa lokal/daerah, bahkan juga agama dan keyakinan. Disini nampak bahwa ide kebangsaan Indonesia sejak awal tidak diniatkan untuk menyatukan segala bentuk keragaman yang ada ke dalam suatu keseragaman. Budaya lokal justru tetap dipertahankan dan dikembangkan karena keragaman itu merupakan kekuatan lokal, yang dengan demikian juga merupakan kekuatan seluruh bangsa.

Selain itu, perlu disadari pula bahwa bangsa yang akan lahir itu akan hidup dan tinggal bersama dalam satu kesatuan wilayah negara, yang dalam kenyataannya (realita geografik) merupakan kumpulan pulau-pulau yang amat banyak jumlahnya. Sadar akan kenyataan tersebut, maka kehendak untuk bersatu dan hidup bersama harus senantiasa terjaga dan terpelihara. Karena hal itu merupakan faktor perekat utama yang sekaligus akan tetap menjiwai dan menyemangati setiap perjuangan di sepanjang hidup bangsa Indonesia. Disamping itu, seluruh komponen masyarakat yang bhinneka ini harus tetap berada dalam satu kesatuan spirit/karakter, yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan bijak, serta dilandasi kepekaan nurani yang sangat dalam, para pendiri bangsa (*the Founding Father*) kita berhasil mengangkat nilai-nilai yang terkandung di dalam khasanah kehidupan masyarakat Indonesia maupun ajaran para leluhur sebagai nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Kemudian nilai-nilai kebangsaan dimaksud dirumuskan secara konkrit serta disepakati untuk dijadikan landasan dan pedoman didalam pembentukan dan penyelenggaraan negara, serta didalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia yang menegara merupakan suatu kenyataan meskipun bila ditinjau dari asal-usul dan terjadinya merupakan keluarbiasaan yang tergolong sangat unik, ternyata bangsa ini berkembang maju hingga saat ini. Hal itu dimungkinkan karena ada faktor pendorong dan pengikat yang kuat. Wawasan kebangsaan mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang Negara sebagai suatu wilayah Kekuatan Negara, penduduk negara sebagai potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya yang melimpah. Nilai-nilai tersebut

dapat disebutkan yaitu bagaimana penghargaan terhadap harkat dan martabat bangsa Indonesia yang harus terus dipertahankan dan dapat ditingkatkan. Memiliki kekuatan tekad untuk tujuan maupun cita-cita nasional, tempat mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional yang pada hakikatnya adalah kepentingan keamanan dan kesejahteraan guna mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, tanah air dan bangsa. Selanjutnya adalah kesepakatan tentang cara pencapaian tujuan nasional yang merupakan himpunan nilai-nilai yang meliputi bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang menjadi fondasi untuk memperkokoh Persatuan dan Kesatuan NKRI.

Adapun pembahasan atas nilai-nilai wawasan Kebangsaan itu diurai melalui pemahaman nilai-nilainya, pengertian hakekat dan prinsip serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemahaman dan bagaimana memasyarakatkan pemahamannya untuk memperkokoh Persatuan dan Kesatuan bangsa? Oleh sebab itu, memahami sungguh-sungguh nilai-nilai Wawasan Kebangsaan adalah menjadi kewajiban setiap warga negara, sehingga terbentuklah sikap moral yang kuat, guna ikut berpartisipasi dalam rangka memperkokoh Persatuan dan Kesatuan NKRI. Wawasan kebangsaan sebagai sudut pandang suatu bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya pada dasarnya merupakan penjabaran dari falsafah bangsa sesuai dengan keadaan wilayah suatu negara dan sejarah yang dialaminya. Wawasan ini menentukan cara suatu bangsa memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya serta bagaimana bangsa memandang diri dan lingkungannya baik kedalam maupun keluar.

Sejak terjadinya krisis multidimensional muncul ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal itu tampak dari konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabdian terhadap ketentuan hukum, peraturan dan sebagainya yang disebabkan oleh berbagai faktor yaitu melemahnya penghayatan dan pengalaman agama dan munculnya pemahaman terhadap agama yang keliru serta sempit, ketidakharmonisannya pola interaksi antara umat beragama.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), makna dan hakikat serta pengetahuan wawasan kebangsaan tersebut penting dipahami oleh setiap warga negara Indonesia, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekarang telah beralih nama menjadi

Aparat Sipil Negara (ASN), mengingat kedudukannya sebagai salah satu unsur aparatur negara yang berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dilihat dari kondisi wilayah Provinsi Papua Barat khususnya di Kota Sorong, yang terdiri dari berbagai macam suku dengan beragam kebudayaan, tatanan sosial, keadaan ekonomi membuat kondisi keamanan dan ketentraman hidup bermasyarakat kurang kondusif dengan mempertimbangkan berbagai peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat kota Sorong maka dituntut adanya rasa tanggung jawab seluruh aparat dalam tugas dan fungsinya masing-masing. Satu tantangan utama saat ini khususnya daerah Kota Sorong, yaitu bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mewujudkan sistem tatanan politik yang demokratis. Hal tersebut akan menjadi dasar pokok penentu arah pembangunan politik kedepan baik berdimensi penguatan persatuan dan kesatuan serta dimensi pembangunan sistem politik demokrasi.

Dari kontekstual diatas Kota Sorong dengan penduduk yang majemuk serta berbagai konflik sosial politik yang begitu kompleks, jelas bahwa perlunya dikembangkan sosialisasi lebih luas dan penerapan etika dalam setiap interaksi antarkomponen masyarakat dengan melibatkan peran Lembaga Sosial Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Media Massa dengan tujuan untuk menciptakan saling pengertian dalam kehidupan kemasyarakatan diseluruh lapisan masyarakat di daerah Kota Sorong, dengan demikian daerah Kota Sorong melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat akan terus melakukan pembinaan kepada masyarakat yaitu dengan memberikan pemahaman perilaku etika politik dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan masyarakat yang majemuk tersebut menyadari akan perilaku kehidupan bermasyarakat, selain itu pula Lembaga sosial masyarakat, Perguruan Tinggi ikut berperan dalam membina generasi muda melalui kampus, serta tak lepas pula peran dari media massa melalui rubriknya yang bisa langsung di konsumsi oleh masyarakat.

Oleh karna itu, dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah Kota Sorong pada umumnya merupakan tanggung jawab bersama guna menjaga keamanan dan ketertiban didalam kehidupan masyarakat. Peran dan tanggung jawab dimaksud merupakan konsekuensi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti masalah nilai-nilai moral dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, serta penanaman dan pemantapan nilai-nilai wawasan kebangsaan ditengah-tengah lingkungan

masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOL & LINMAS).

METODOLOGI

Tempat dan Waktu Penelitian

Agar penelitian ini tepat sasaran dengan rumusan masalah yang hendak di kaji oleh penulis yaitu : ”*Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol & Linmas) Kota Sorong*”, maka yang menjadi tempat atau lokasi dilakukannya penelitian ini ialah pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol & Linmas) Kota Sorong. Waktu penelitian direncanakan akan di lakukan mulai dari bulan Oktober 2016–Januari 2017.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah berupa suatu pendekatan yng juga disebut pendekatan investigasi, karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang berada di tempat penelitian

Populasi dan Sampel

35

Pengertian populasi adalah suatu wilayah yang bersifat general yang terdiri dari subyek ataupun objek dengan karakteristik tertentu. (*Pengertian Populasi menurut Sugiyono 2005:90*) Sehingga dalam penelitian ini populasi dibatasi sebagai sejumlah kelompok atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama.

Berdasarkan ringkasan diatas, serta terkait dengan judul dari penelitian ini maka populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Sorong secara umum dan secara khusus adalah pegawai pada unit Satuan Perangkat Kerja Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOL & LINMAS) Kota Sorong. Pengertian sampel adalah sebagaian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dijelaskan dalam buku metode penelitian oleh Sugiyono (2012:120).

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi obyek penelitian adalah pegawai pada kantor Kesbangpol & Linmas Kota Sorong, yakni sebanyak 3 orang yang mana terdiri dari Kepala Badan Kesbangpol, Kepala bidang/subbid, dan Staf pegawai.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ada beberapa teknik yang penulis gunakan, antara lain ialah : Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan serta mencatat dengan sistematis gejala-gejala yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Wawancara (*interview*) adalah proses tanya jawab lisan antara 2 (dua) orang atau lebih secara langsung. Pewawancara di sebut sebagai *interviewer* dan orang yang di wawancarai disebut sebagai *interviewee*. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermamfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatkan Wawasan Kebangsaan di Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lingkungan Kesbangpol & Linmas Kota Sorong.

Bangsa Indonesia mengembangkan wawasan kebangsaan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya pembinaan karakter dan jati diri guna meningkatkan kualitas sehingga Bangsa Indonesia mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, termasuk ancaman integrasi Indonesia mengingat wawasan kebangsaan. Aktualisasi wawasan kebangsaan adalah merupakan partisipasi nyata oleh setiap warga negara dan komponen bangsa sebagai indikator dalam membangun bangsa untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mengangkat harkat dan martabat Bangsa Indonesia di tengah-tengah pergaulan antar bangsa atau negara di dunia.

Agar pembangunan Bangsa dan Negara dapat menjangkau masyarakat luas, maka daerah atau wilayah perbatasan sebagai bagian Integral Wilayah dan Teritorial NKRI, memiliki

kompetemen strategi dalam konsepsi pembangunan wawasan Kebangsaan yang di sepakati oleh 4 pilar, yaitu : Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Adapun Kinerja SKPD Kesbangpol & Linmas Kota Sorong berdasarkan hasil dari penelitian, dapat disampaikan sebagai berikut; Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kota Sorong merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan stabilitas daerah.

Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kota Sorong. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui Program dan kegiatan-kegiatan. Analisis Akuntabilitas Kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dimana Badan Kesbangpol dan Linmas telah memberikan target sebagaimana yang ada didalam Renstra 2012-2017, tentunya dalam capainnya dapatlah kita lihat analisisnya, sejauhmana prosentasenya ?. Dan sumber dana untuk membiayai kegiatan program kerja serta realisasi program kegiatan Badan Kesbangpol dan Linas Kota Sorong Tahun Anggaran 2015 berasal dari APBD Pemerintah Kota Sorong, dengan rincian sebagai berikut :

Pelaksanaan wawancara dengan kepala Sub. bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Kegiatan dengan tema Bagaimana Pelaksanaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dibidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan Pada Kesbangpol & Linmas Kota Sorong ?, Adapun dalam pelaksanaan peningkatan wawasan kebangsaan dari hasil proses tanya jawab disampaikan secara ringkas sebagaimana telah dijabarkan lewat observasi dan dokumentasi.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dibidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan di Lingkungan Kesbangpol & Linmas Kota Sorong

Akuntabilitas Keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sorong telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program sebagaimana kebijakan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015. Pada tahun 2015 Total Anggaran Belanja Badan KesbangPol dan Linmas Rp. 3.972.325.660,00 yang meliputi anggaran Biaya Tidak Langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Dengan realisasi atau

serapan tahun ini adalah Rp. 3.972.325.660,00 (100%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Dalam menjalankan kegiatan dan program selama tahun 2015, Badan KesbangPol dan Linmas Kota Sorong menghadapi hambatan dan kendala baik secara administratif maupun keadaan di lapangan. Adapun hambatan dan kendala yang dapat dihimpun selama kegiatan tahun 2015, adalah sebagai berikut : Terlambatnya realisasi anggaran dan kecilnya uang persediaan (UP) yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan KesbangPol dan Linmas Kota Sorong; Tidak adanya kesamaan/sinkronisasi struktur organisasi di tingkat Provinsi, dan Kab/Kota yang mengakibatkan terputusnya garis komando, sehingga sering terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan dan pembagian tugas; Banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas, OKP, LSM, Paguyuban dan Yayasan sebagian besar tidak dilaporkan serta sebagian besar Ormas, OKP, LSM, Paguyuban dan Yayasan belum menyediakan sekretariat dan tidak memiliki papan nama; Kegiatan yang dilaksanakan oleh parpol sebagian besar masih lambat dan melaporkan/ tidak ada penyampaian laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan Parpol.

Dari hasil *interview* (wawancara) mendapatkan isu aktual berdasarkan pengamatan dari peneliti, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan dari struktur kinerja untuk mewujudkan misi organisasi yang terpilih. Diidentifikasi 3 (tiga) isu penting yang perlu di pecahkan agar misi organisasi dapat diwujudkan sebagaimana mestinya, namun demikian tidak semua isu dapat di pecahkan secara simultan. Pada pembahasan laporan observasi lapangan ini hanya isu yang paling dominan yang akan di pecahkan, untuk itu perlu ditetapkan salah satu isu dari ketiga isu yang di identifikasikan tersebut.

SIMPULAN

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Sorong dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Sorong Nomor 24 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang dan Seksi pada Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Sorong, maka sesuai dengan Visi dan Misi melakukan berbagai program dalam upaya menciptakan dan mewujudkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat Kota Sorong, dapat disimpulkan;

Kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Sorong pada tahun 2015 telah mengadakan pendeteksian dini dalam permasalahan yang ada di masyarakat melalui KOMINDA Kota Sorong; Forum Lintas Suku Asli Papua Raya Kota Sorong serta pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat, melaksanakan pembinaan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik sehingga dalam meminimalisir terjadinya konflik baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan perusahaan yang beroperasi di Kota Sorong; Namun kita akui tentunya masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi seperti masih terbatasnya sarana dan prasarana, belum validnya Basis Data pada KesbangPol dan Linmas Kota Sorong, sehingga perlu ditindaklanjuti permasalahan dimaksud, terlebih pada porsi Anggaran yang ada pada SKPD ini, dan juga diperlukan Peraturan yang secara tegas yang dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah atau Keputusan Walikota.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict, 1991 *Imagined Community : reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, Verso : London.
- Basari, Hasan / Bernhard Dahm, 1987. *Sukarno dan perjuangan kemerdekaan*, : LP3ES. Jakarta.
- Urkheim, Emile (et.al.), 1964. *Essay on Philosophy and Sociology*, Harper Books.
- Dahl, Robert A., 1982. *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs Control*, Yale University Press.
- Gonggong, Anhar dalam “Diskusi Terbatas,” “*Perspektif Sejarah atas Demokrasi Indonesia*,” 11 September 2002, di Bappenas, oleh Direktorat Politik, Komunikasi dan Informasi.
- Huntington, Samuel P. 1991. *Democracy’s Third Wave*, dalam *Journal of Democracy*, Spring.
- <http://mukti-com.blogspot.com/2012/08/teori-kebangsaan.html>.
- http://artpelajar.blogspot.com/2012/12/pengertian-sejarah_17.html.
- Kartasmita, Ginandjar. 1994. “*Pembangunan Nasional dan Wawasan Kebangsaan*” Makalah disampaikan pada Sarasehan Nasional Wawasan Kebangsaan di Jakarta.
- Linz, Juan J. dan Alfred Stepan, 2001. *Mendefinisikan dan Membangun Demokrasi*, dalam “Menjauhi Demokrasi Kaum Pemnajah”, Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (ed.), : Mizan, Bandung.

Parsons, Talcott. 1951. *Toward a General Theory of action*. New York : Harper & Row,. New York.

Sudarsono, Juwono, (Ed.), 1994. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Gramedia : Jakarta.